



Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 - 2024





BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1877);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015- 2019;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
 - c. Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
 - d. Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - e. Bab V : Penutup
2. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

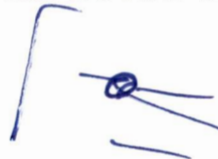
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 18-12-2023

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 18-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

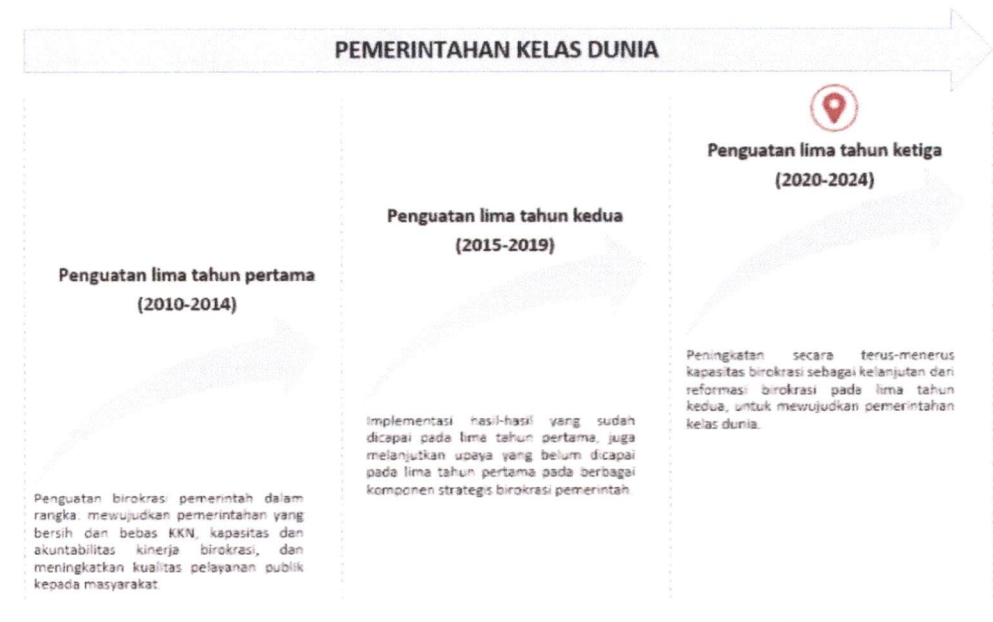
1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi



Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan

kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB - yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Road Map Reformasi Birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari Reformasi Birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi* yaitu:

1. Jelas. *Road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) harus dapat diukur;
4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;

6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Kelembagaan

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara

2.1.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Utara. Pernyataan visi Kabupaten Buton Utara periode 2021-2026 menjadi arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, adalah: **“TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**. Pernyataan visi Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Buton Utara yang Maju. Memiliki makna bahwa terwujudnya pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara mengarah ke kondisi yang lebih baik dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan terbebas dari ketertinggalan.
- 2) Buton Utara yang Adil Memiliki makna bahwa pembangunan daerah mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial antara desa dan kota, dan antar berbagai entitas masyarakat Buton Utara yang sangat beragam.
- 3) Buton Utara yang Sejahtera Memiliki makna bahwa pembangunan daerah mengarah pada terwujudnya Buton Utara yang masyarakatnya sejahtera, beradab, memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan bermartabat.

RPJMD Kabupaten Buton Utara periode tahun 2021-2026 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka “pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Selanjutnya, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan terampil melalui peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan. Misi ini bermaksud memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah Kabupaten Buton Utara terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan memberikan jaminan dan kepastian pada peningkatan akses dan layanan pendidikan, derajat dan kualitas kesehatan serta pengetahuan dan keterampilan kerja.
- 2) Peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini bermaksud memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah Kabupaten Buton Utara terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang serta pemerataan dan percepatan akses intra dan antar wilayah Kabupaten Buton Utara guna menunjang keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui inovasi pengembangan sektor unggulan dan investasi berbasis potensi daerah. Misi ini bermaksud untuk memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dengan meningkatkan investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis potensi wilayah, pemerataan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja bagi pencari kerja.
- 4) Penerapan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Misi ini bermaksud untuk memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi guna penegakan supremasi hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, nyaman dan religius. Misi ini bermaksud bahwa pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung terciptanya iklim politik yang demokratis dan religius dengan meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan guna mendukung pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

2.1.2. Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Buton Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, terdiri atas :

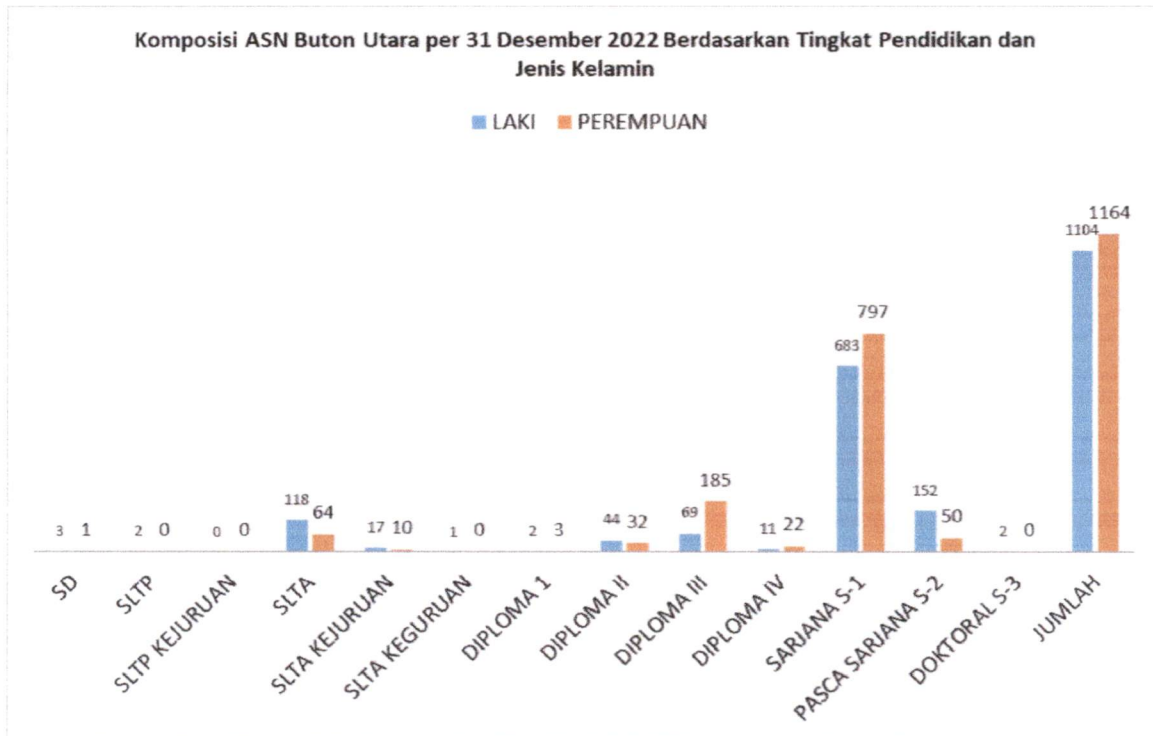
1. Staf Ahli Bupati, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
2. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum; dan
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi; dan
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat Daerah
5. Dinas Daerah (28 Dinas), yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Dinas Pertanahan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Transmigrasi;
 - u. Dinas Perikanan;
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Badan Daerah yang terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan
9. Kecamatan yang berjumlah 6 (enam).

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

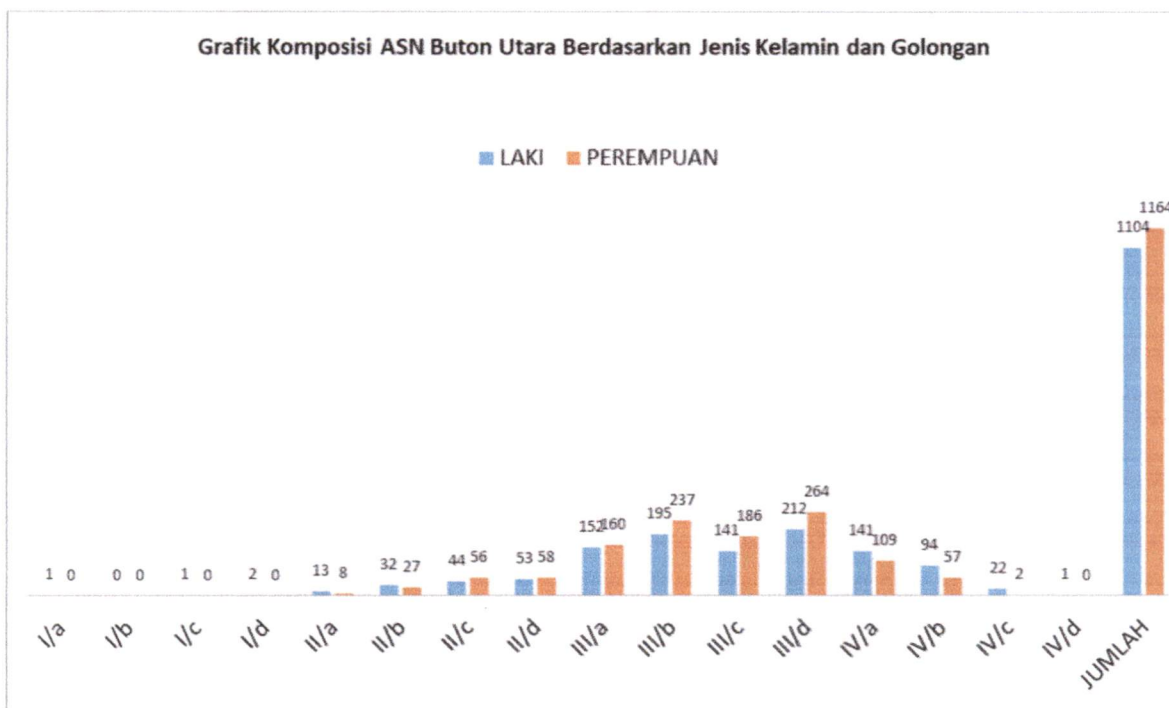
Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton Utara per Desember Tahun 2022 berjumlah 2268 PNS yang terbagi menjadi 1.104 PNS pria dan 1164 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikan, Golongan/Pangkat dan Jenis Kelamin, maka komposisi PNS di Kabupaten Buton Utara dapat digambarkan berikut.

1. Grafik Data PNS Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber : BKPSDM Kabupaten Buton Utara per Desember 2022

2. Grafik Data PNS Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin



2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Buton Utara sesuai dengan Perubahan *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* dibandingkan dengan target *Road Map* RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting (Tahun 2022)
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	56.80	Indeks Reformasi Birokrasi 57.67
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Angka Kemiskinan Menurun	12.50	14.26
			Pertumbuhan Investasi Meningkat	Rp.15.8 M	Nilai Realisasi Investasi Rp. 24.12 M
2	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	3,2	2,02
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Baik	Baik/B = 69	Baik/B = 65.66
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP sejak Tahun 2016
3	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	7,66%	-	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	-	61.70% (Cukup Sehat)
		Survei Internal Organisasi	Nilai meningkat	-	73.32
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai meningkat	Baik	Tahun 2022 dengan nilai 81.43 (Baik)

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* telah menetapkan tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasional. **Tujuan** yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah **“Pemerintahan yang baik dan bersih”**, sedangkan **tujuan** dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Sedangkan Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional*, serta bersifat *mandatory*.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecahkan masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.

KEGIATAN UTAMA MANDATORY

Kegiatan utama Reformasi Birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Struktur Organisasi/transformatasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (Tahun 2022 terealisasi 99%)
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai (sudah ada Draft Perbup Sistem Kerja ASN Tahun 2023)
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE (Nilai tahun 2022 = 2.02)
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Tahun 2022 = belum ada nilai)
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP (Nilai tahun 2022 nilai "B" = 65.66)
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai tahun 2022 = 81.43)
		Indeks Pelayanan Publik (Nilai tahun 2022 = 87.88)
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan
7	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Tahun 2022 belum ada pencanangan)
8.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai Tahun 2022 = Level 2)
9.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindaklanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
10.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (Nilai tahun 2022 = 73.32)
		MCP KPK (Nilai tahun 2022 = 35%)
		Kepatuhan penyampaian LHKPN (Nilai tahun 2022 = 100%)
11.	Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP (Nilai tahun 2022 = 2.0)
12.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (Nilai tahun 2021 = Belum ada penilaian)

No	Kegiatan Utama	Indikator
13.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum Nilai tahun 2022 = belum ada penilaian)
14.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip (Nilai tahun 2022 = belum ada penilaian)
15.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Nilai tahun 2022 = belum ada penilaian)
16.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola PBJ (Nilai tahun 2022 = 44.80)
17.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai Tahun 2022 = belum ada penilaian)
		Opini BPK (WTP sejak tahun 2016)
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (capaian tahun 2022 = 80.56)
18.	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Merit System (Nilai tahun 2022 = nol)
19.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	
20.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	
21.	Penguatan Sistem Merit	
22.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK (Nilai tahun 2022 = 61.70%)

KEGIATAN UTAMA INISIATIF

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil atau outcome (bukan output) dan memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RB. Kegiatan Utama inisiatif ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (perampingan OPD)	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia
4.	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Angka Kemiskinan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender
6.	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
A.	MANDATORY						
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	90%	Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023	Implementasi Hasil Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai (sudah ada Draft Perbup Sistem Kerja ASN Tahun 2023)	Sudah ada Draft Perbup Sistem Kerja ASN	Penetapan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja ASN	Implementasi Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja ASN	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE)	2.02	3.00	3.20	Kominfo	Semua Unit Kerja
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	NA	-	-	Kominfo	Semua Unit Kerja
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	65.66 (B)	68 (B)	72 (BB)	Bappeda/ Inspektorat/ BKAD/ Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital (MPP*)	NA	-	Penyusunan/Penilaian kelayakan pembangunan MPP		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81.43	85	88	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
		Indeks Pelayanan Publik	87.88	92	95	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
6.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	66.28	71 (Hijau)	75 (Hijau)	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
7.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	NA	Penetapan SK Bupati tentang penunjukan OPD pelaksana ZI	WBK/WBBM	Inspektorat	Semua Unit Kerja
8.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Inspektorat	Semua Unit Kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
9.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindaklanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100%	Kominfo/ Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
10.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	73.32%	78.00%	80.00%	Inspektorat	Semua Unit Kerja
		MCP KPK	35%	60%	80%	Inspektorat	Semua Unit Kerja
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	Inspektorat	Semua Unit Kerja
11.	Penguatan Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Inspektorat	Semua Unit Kerja
12.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	NA	-	-	Bappeda/Bagian Hukum	Semua Unit Kerja
13.	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	0	60	75	Bagian Hukum	Semua Unit Kerja
14.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	0	0	30%	Perpustakaan	Semua Unit Kerja
15.	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	0	30%	Kominfo	Semua Unit Kerja
16.	Penguatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	44.80	70	75	UKPBJ	Semua Unit Kerja
17.	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD /Inspektorat	Semua Unit Kerja
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	80.56%	87%	89%	Inspektorat	Semua Unit Kerja
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	NA	0	0	BKAD	Semua Unit Kerja
18.	Penataan Jabatan Fungsional;	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	0	100	200	BKPSDM/Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
19.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta				BKPSDM/Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
20.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN				BKPSDM/Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
21.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit				BKPSDM/Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
22.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	61.7% (Cukup Sehat)	75% (Sehat)	80% (Sehat)	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
B	KEGIATAN UTAMA INISIATIF DAERAH						
1.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	57.67	82	88	Inspektorat/ Bagor/Bappeda	Semua Unit Kerja
2.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (perampingan OPD)	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	29 OPD	32 OPD	34 OPD	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
3.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	69	70	71	Bappeda/ Dinkes/ Diknas	Semua Unit Kerja
4.	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Angka Kemiskinan	14.26	13	12.5	Bappeda/ Dinsos	Semua Unit Kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3%	2.5%	2%	Dinas Koperasi	Semua Unit Kerja
5.	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	92.82	93.5	94.5	DPPPA	Semua Unit Kerja
6.	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4.08	5%	6%	DPM-PTSP	Semua Unit Kerja
7.	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74.44	75	78	DLH	Semua Unit Kerja

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024* yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menetapkan 5 (lima) tema Reformasi Birokrasi tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Pengendalian inflasi.
3. Digitalisasi pemerintahan dengan focus penanganan stunting;
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Peningkatan investasi;

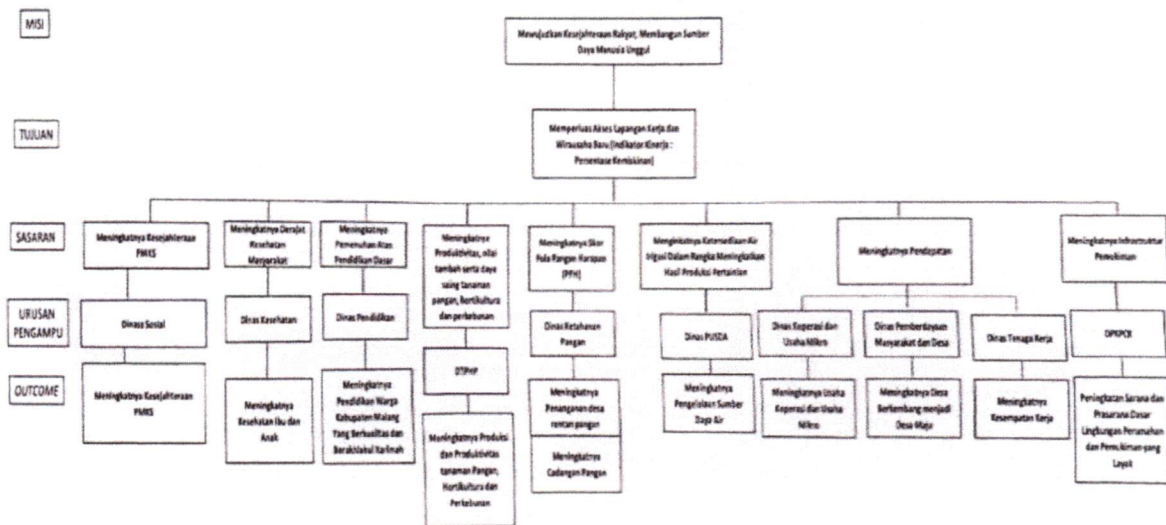
PENJELASAN MASING-MASING TEMA

a. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Buton Utara tahun 2022 sebesar 14.26% atau sebanyak 9450 orang. Berdasarkan data hasil kajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Utara melaksanakan berbagai strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
2. Menciptakan lapangan kerja yang diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan;
3. Penanganan Stunting;
4. Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja;
5. Memberikan bantuan modal usaha.

Area *logical framework* kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana proses bisnis/pohon kinerja dibawah ini :



Pohon Kerja Penanganan Stunting

Misi 5	Memperluas Pemazfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																	
TUJUAN	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi					Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Konjungsi Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri					Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman							
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi					Indeks Daya Saing Pariwisata					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)			Meningkatnya daya saing pariwisata					Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketanggahan dan ketahanan terhadap bencana					
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Ekstran, Reparatasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Indikator (JKI) Mantap Penunjang Pariwisata	Humane Tourism Indikator (HTI)	Paise Competitiveness Indicator (PCI)	Openness Indicator (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seri Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Risiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistic meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang

dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

b. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten Buton Utara terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara, maka Kabupaten Buton Utara memilih tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Buton Utara, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah;
2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
3. Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara yang kurang mendukung untuk menyaman berinvestasi;
4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.

Guna penyampaian target Peningkatan investasi maka disusun pohon kinerja sebagai berikut:

Misi 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																	
TUJUAN	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan Usaha Ekonomi						Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Wisatawan Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman							
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi						Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
Sasaran	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah		Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)				Meningkatnya daya saing pariwisata			Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana			
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persentase Pertumbuhan PORB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PORB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PORB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PORB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PORB Sub Sektor Perkebunan	Persentase pertumbuhan PORB Sub Sektor Peternakan	Persentase pertumbuhan PORB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humana Tourism Indicator (HTI)	Pulse Competitiveness Indicator (PCI)	Openness Indikator (OI)	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Risiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Berikut Capaian Indikator Kinerja menurut Urusan Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 :

No.	Uraian	Satuan	Capaian	Keterangan
1	Total Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rupiah	46,2 M	Mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan kepada pelaku usaha yang wajib Ikm, jika tidak melakukan pelaporan Ikm akan dikenakan sanksi.
2	Jumlah Investor (PMA dan PMDN)	Investor	34	Sampai dengan saat ini, tidak ada PMA yang di Buton Utara, semuanya PMDN
3	Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rupiah	0	Tidak ada investor pma yang masuk
4	Nilai Investasi (PMDN)	Rupiah	46,2 M	Meningkat di karenakan sekarang ada aturan kalau pelaku usaha yang wajib Ikm tidak melakukan pelaporan Ikm akan dikenakan sanksi
5	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan	Perizinan dan Nonperizinan	395	Berdasarkan izin daerah yang di keluarkan selain dari NIB
6	Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung	Izin	1	Yang mengurus banyak tapi yang terbit hanya satu dikarenakan perubahan dari IMB ke PBG
7	Izin Reklame	Izin	0	Tidak ada permohonan masuk
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Kartu	0	Tidak ada izin trayek yang terbit
9	Jumlah Investor PMA	Investor	0	Tidak ada investor masuk
10	Jumlah Investor PMDN	Investor	34	-
11	Daya serap tenaga kerja	Orang	-	-
12	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	-	-
13	Jumlah Perusahaan yang memiliki NIB	Perusahaan	34	Berdasarkan data dari sistem oss jumlah nin yang terbit Januari-desember 2022
14	Jumlah Pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Pelaku Usaha	870	Berdasarkan data dari sistem oss jumlah nin yang terbit Januari-desember 2022

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Buton Utara tahun 2023.

c. Digitalisasi Pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah membuat Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Buton Utara menyediakan *website* <https://butonutarakab.go.id/>. Indeks SPBE tahun 2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Kabupaten Buton Utara memiliki nilai Indeks SPBE 2,02 menduduki peringkat 3 pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam melakukan penerapan teknologi informasi yang menjadi mandatory pemerintah pusat di daerah, disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Buton Utara memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) OSS : untuk mengakses perijinan berusaha;
- 2) SIPD-RI : untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
- 3) LAPOR-SP4N : untuk pengaduan pelayanan publik;
- 4) SIHARKA : untuk melaporkan harta kekayaan;

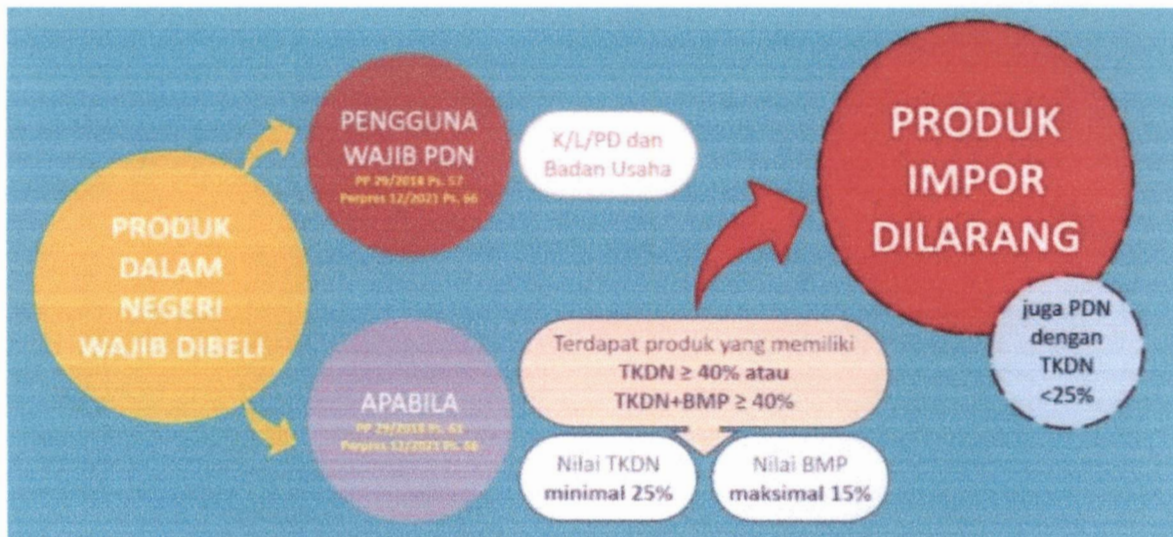
- 5) SISKEUDES : untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
- 6) SiASN : untuk informasi kepegawaian;
- 7) E-FORMASI : untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang dibutuhkan pada instansi terkait;
- 8) E-CATALOG : untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- 9) E-PURCHASING : untuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 10) E-SIRUP : untuk meningkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa pemerintahan;
- 11) SIMDA KEUANGAN / SIMDA BMD : untuk melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pelaporan dan aset;
- 12) E-SAKIP Butur : untuk pelaporan kinerja (SAKIP) semua perangkat daerah.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Buton Utara sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

1. Wilayah Kabupaten Buton Utara sebagian besar masih terdapat *blankspot* khususnya tempat wisata;
2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS);
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis online terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

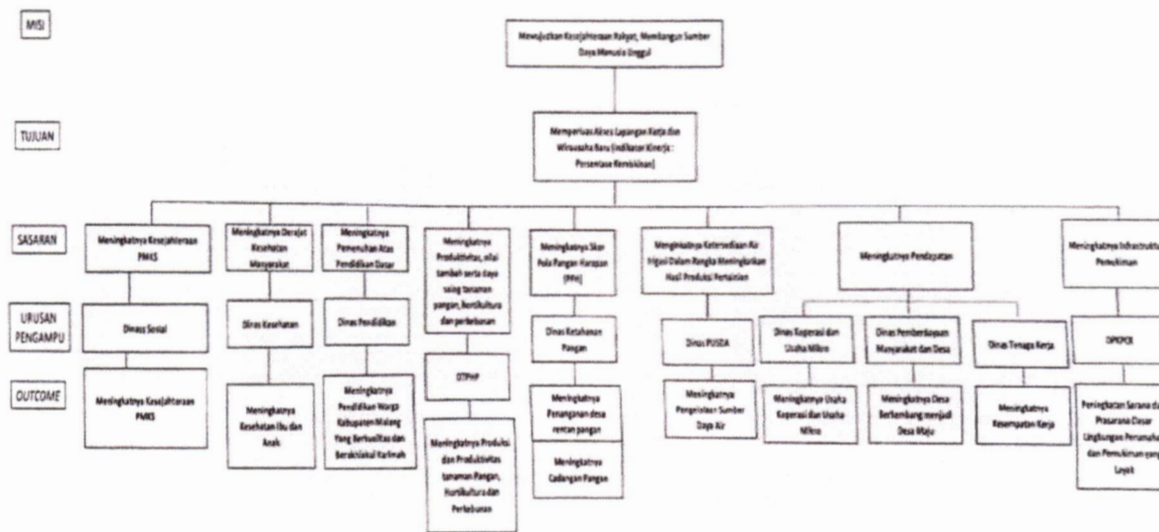
c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website <http://tkdn.kemenprin.go.id>. Menindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pohon Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri



d. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Buton Utara, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buton Utara dengan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 21 Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buton Utara. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

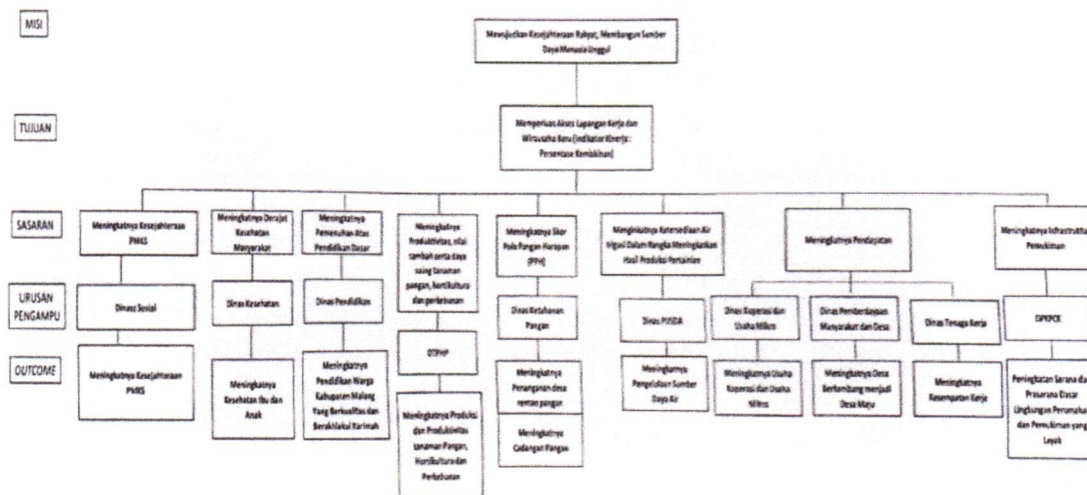
Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Buton Utara mengikuti inflasi Kota Baubau dan Kota Kendari sebesar 7.11% (yoy) lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 7.39% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Buton Utara tahun 2020 – 2022.

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022
Inflasi/IPH	Persen	0.45	0.23	7.11

Sumber : BPS Kab. Buton Utara

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara. Pada Tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *nontradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pohon Kerja Penanganan Inflasi



Crosscutting Pengendalian Inflasi

Misi 5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan																	
TUJUAN	Meningkatkan Nilai Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberhasilan Usaha Ekonomi						Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Domestik dan Luar Negeri				Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman							
Indikator Tujuan	Pertumbuhan Ekonomi						Indeks Daya Saing Pariwisata				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
Sasaran	Meningkatnya kualitas bisnis usaha dan investasi daerah	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)				Meningkatnya daya saing pariwisata				Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketahanan dan ketahanan terhadap bencana				
Indikator Sasaran	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	Persentase pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap Penunjang Pariwisata	Humanis Tourism Indikator (HTI)	Pole Competi Evness Indicator (PCI)	Opernesu Indikator (OI)	Persentase Sifat Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Tanah	Indeks Risiko Bencana
Perangkat Daerah Pengampu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Industri dan Perdagangan		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Dinas Lingkungan Hidup		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

Susunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara, terdiri dari :

I. Tim Pengarah :

- Ketua : Bupati Buton Utara
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Buton Utara
- Sekretaris : Sekretaris Daerah
- Anggota : Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah

II. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General :

- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
- Anggota :
- 1. Inspektur Daerah
- 2. Kepala Bappeda
- 3. Kepala BKAD
- 4. Kepala BKPSDM
- 5. Kepala Dinas Kominfo

6. Kepala Bagian Hukum

III. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik :

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi

Anggota :

Bidang-Bidang :

a. Tematik Pengentasan Kemiskinan :

Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU-PR, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan.

b. Tematik Peningkatan Investasi :

Bappeda, DPM-PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas PU-PR, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan :

Dinas Kominfo, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi.

d. Tematik Penanganan Stunting :

Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, Dinas PU-PR, Dinas Perumahan dan KP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan

e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:

Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKPBJ.

f. Tematik Pengendalian Inflasi :

Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Ekonomi Setda.

IV. Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton Utara, beranggotakan:

A. Ketua : Sekretaris Daerah

B. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

C. Anggota :

1. Inspektur Daerah;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Road

Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah.

Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan :

1. Tingkat Perangkat Daerah

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
- b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan melalui :

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang telah disusun;

5. Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah . Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian maturitasnya.
3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev.

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 ini merupakan revisi atas *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021. Revisi *Road Map* RB ini disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 tahun 2023 sebagai perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* RB Tahun 2020-2024 yang di dalamnya memuat tentang *Road Map* RB General dan *Road Map* RB Tematik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Buton Utara tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah/*agile*. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan dirasakan manfaatnya kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
 BUTON UTARA TAHUN 2020-2024

**FORM IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA DALAM RB GENERAL TAHUN 2023
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
A. MANDATORY						
SS.1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel					
S.1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	2	10	22
S.2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	8	10	28
S.3.	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	10	10	30
S.4.	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	8	10	28
S.5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	5 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	10	10	30
		6 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	8	8	26
S.6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7 Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
		8 Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	8	10	28
		9 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	8	5	23
		10 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	10	10	30
		11 Penguatan Kapabilitas APIP	10	10	10	30
S.7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	12 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	5	5	20
		13 Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	10	5	5	20
S.8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	14 Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	10	30
		15 Pelaksanaan data statistik sektoral	10	10	10	30
S.9.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	16 Penguatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah	10	10	10	30
		17 Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	10	5	5	20
SS.2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
S.1.	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	18 Penataan Jabatan Fungsional;	10	5	10	25
S.2.	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	19 Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	10	10	30
S.6.	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	20 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;	10	10	10	30
S.7.	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	21 Penguatan Sistem Merit	10	10	10	30
		22 Pelaksanaan Core Values ASN	10	8	8	26

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
B.	INISIATIF DAERAH					
		1 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Inovatif	10	6	10	26
		2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (perampingan OPD)	10	6	7	23
		3 Meningkatkan Pembangunan Sumber Manusia yang unggul	10	7	7	24
		4 Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	10	10	8	28
		5 Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	8	28
		6 Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan UsahaEkonomi	10	10	10	30
		7 Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	10	8	8	26

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 TAHUN 2020-2024

Matriks Road Map Reformasi Birokrasi General Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
A.	MANDATORY							
SS.1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel							
S.1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	90%	Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023	Implementasi Hasil Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
S.2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	50%	Penetapan Perbup Sistem Kerja ASN (90%)	Implementasi Perbup Sistem Kerja ASN (100%)	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
S.3.	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,02	3,00	3,20	Kominfo	Semua Unit Kerja
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE*)	NA			Kominfo	Semua Unit Kerja
S.4.	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan*)	NA			Bappeda	Semua Unit Kerja
			Nilai SAKIP	65,66	68,00	72,00	Bappeda/ Inspektorat/ Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*)	NA	-	Penyusunan/penilaian kelayakan pembangunan MPP	DPM-PTSP/ DUKCAPIL/ Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
				Indeks Kepuasan Masyarakat	81,43	85,00	88,00	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
				Indeks Pelayanan Publik	87,88	92,00	95,00	Bagian Organisasi	PTSP, Dukcapil
		6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	66.28 (Kuning)	70 (Hijau)	75 (Hijau)	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
S.6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	NA	Penetapan SK Bupati tentang penunjukan OPD pelaksana ZI	WBK/WBBM	Inspektorat	Semua Unit Kerja
		8	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Inspektorat	Semua Unit Kerja
		9	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindaklanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	100%	100%	Kominfo	Semua Unit Kerja
		10	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	73,32	78,00	80,00	Inspektorat	Semua Unit Kerja
				MCP KPK	35%	60%	80%	Inspektorat	Bappeda/BKAD/DPM D/DPM-PTSP/BKPSDM/Bag. Hukum/ Bagor/ UKPBJ
				Kepatuhan Penyampaian LHKPN	100%	100%	100%	Inspektorat	Semua Unit Kerja
11	Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Inspektorat	Semua Unit Kerja		
S.7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	0	40	60	Bappeda/ Bagian Hukum	Semua Unit Kerja
		13	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA	60	75	Bagian Hukum	Semua Unit Kerja

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						2023	2024	Koordinator	Pelaksana
S.8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	14	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	0	0	30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsinan	Semua Unit Kerja
		15	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0	0	30	Kominfo	Semua Unit Kerja
S.9.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	16	Penguatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	44,80	70,00	75,00	UKPBJ	Semua Unit Kerja
		17	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD/Inspektorat	Semua Unit Kerja
				Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	80,56%	87,00%	89,00%	Inspektorat	Semua Unit Kerja
				Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	NA	0	0	BKAD	Semua Unit Kerja
SS.2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								
S.1.	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	18	Penataan Jabatan Fungsional;	Indeks Sistem Merit	0	100	200	BKPSDM/Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
S.2.	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	19	Penguatan Manajemen Talenta ASN						
S.6.	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	20	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;						
S.7.	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	21	Penguatan Sistem Merit						
		22	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	61,7% (Cukup Sehat)	75% (Sehat)	80% (Sehat)	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja
B. INISIATIF INSTANSI									
		1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	57,67	82	88	Inspektorat/ Bagor/ Bappeda	Semua Unit Kerja
		2	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (perampingan OPD)	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	30 OPD	32 OPD	34 OPD	Bagian Organisasi	Semua Unit Kerja

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana	
		3	Meningkatkan Pembangunan Sumber Manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	69	70	71	Bappeda/ Dinkes/ Diknas	Semua Unit Kerja
		4	Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru	Angka Kemiskinan	14,26	13	12,5	Bappeda/ Dinsos	Semua Unit Kerja
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3%	2,50%	2%	Dinas Koperasi	Semua Unit Kerja
		5	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	92,82	93,5	94,5	DPPPA	Semua Unit Kerja
		6	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan UsahaEkonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,08%	5%	6%	DPM-PTSP	Semua Unit Kerja
		7	Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,44	75	78	DLH	Semua Unit Kerja

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 TAHUN 2020-2024

FORM PENYUSUNAN RENCANA AKSI ATAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran (Rp.)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	
				(2023)		(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4		Total	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)
SS.1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																					
S.1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Pemetaan Nomenklatur Jabatan berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023	Sosialisasi Permenpan 656 Tahun 2023	Jumlah peserta	Terlaksananya sosialisasi Permenpan 656 Tahun 2023	0	0	0	80 org	80 org	0	Bag. Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	80	100%	0
						Asistensi Penyusunan dok.Anjab/ABK/Peta Jabatan/Evjab sesuai Permenpan 656 Tahun 2023	Jumlah OPD/Unit Kerja yang diasistensi	Terlaksananya Asistensi Penyusunan dok.Anjab/ABK/Peta Jabatan/Evjab sesuai Permenpan 656 Tahun 2023	0	0	10 OPD	28 OPD	38 OPD	0	Bag. Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	0	0%	0
						Penyusunan Draft Perbup Anjab/ABK/ Peta Jabatan/Evjab	Draft Perbup	Tersusnya Draft Perbup Anjab/ABK/ Peta Jabatan/Evjab	0	0	0	1	1	0	Bag. Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	0	0%	0
S.2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Penetapan Perbup Sistem Kerja ASN (90%)	1. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Perbup Sistem Kerja ASN.	SK Tim Kerja	Ditetapkannya SK Tim Kerja Penyusunan Perbup Sistem Kerja ASN	0	0	0	1	1	0	Setda	BKPSDM, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bag. Organisasi, Bag. Hukum	0	0	0	1	100%	0

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran	
				(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)	
					2. Penyusunan Draft Perbup Sistem Kerja ASN	Jumlah Perbup	Tersusunnya Draft Perbup Sistem Kerja ASN	0	0	0	1	1	0	Setda	BKPSDM, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bag. Organisasi, Bag. Hukum	0	0	0	1	100%	0	
S.3.	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3	Penyusunan Raperbup e-Gov	Jumlah Perbup	Tersusunnya Draft Perbup E-Gov	0	1	0	0	1	0	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	1	100%	0
				Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE*)	0									0	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja						0
S.4.	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan*)	0							0	Bappeda	Seluruh Unit Kerja						0	0	
				Nilai SAKIP	68	1. Pendampingan Penguatan SAKIP oleh Kemenpan;	Jumlah peserta	Terlaksananya Pendampingan Penguatan SAKIP	0	0	40 org	0	0	100.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	40	0	113%	100.000.000
						2. Pengembangan Aplikasi E-SAKIP	Jumlah Aplikasi	Terbangunnya aplikasi E-SAKIP Butur	0	0	0	1	1	95.000.000	Bagian Organisasi	SmartID	0	0	0	1	100%	95.000.000
						3. Sosialisasi dan bimtek penggunaan Aplikasi E-SAKIP	Jumlah OPD yang telah mengimplementasikan E-SAKIP Butur	Terimplementasikannya penggunaan aplikasi e-SAKIP Butur	0	0	28	10	38	15.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	28	10	100%	15.000.000
						4. Melakukan reuiu dan penjenjangan/cascading kinerja	Dokumen	Terlaksananya reuiu penjenjangan kinerja semua OPD	0	0	1	0	1	-	Bappeda/ Bagor/ Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	1	0	100%	-

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran			
				(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)			
					5. Melaksanakan Bimtek penyusunan dokumen perencanaan kepada seluruh perencanaan OPD	Jumlah peserta	Bimtek perencanaan OPD	0	60	0	0	60	100.000.000	Bappeda	Seluruh Unit Kerja	0	60	0	0	100%	100.000.000			
S.5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*)								0		DPM-PTSP/Dukcapil/Balogor	Seluruh Unit Kerja					0				
				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Pendampingan Pelaksanaan SKM pada semua OPD	Jumlah OPD yang didampingi	Terlaksananya pendampingan pelaksanaan SKM	12	14	12	0	38		Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja					0			
				Indeks Pelayanan Publik	92,00	1. Sosialisasi evaluasi pelayanan publik pada OPD locus	Jumlah peserta	Terlaksananya pendampingan pelayanan publik	0	40	0	0	40		Bagian Organisasi	Dinsos, RSUD dan Kec. Kulisusu								
						2. Pendampingan dan evaluasi pelayanan publik pada OPD locus	Jumlah OPD locus yang didampingi	Terlaksananya pendampingan pelayanan publik	0	3	0	0	3		Bagian Organisasi	Dinsos, RSUD dan Kec. Kulisusu								
		6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	70 (Hijau)	Pendampingan, pembinaan dan evaluasi OPD locus penilaian	Jumlah OPD	OPD locus penilaian	0	6	0	0	6		Bagian Organisasi	Dinsos/ Diknas/ PTSP /Dukcapil/ PKM Wd. Buri /PKM Kulisusu	0	6	0	0	100%	0		
		7	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Penetapan SK Bupati tentang penunjukan OPD pelaksana ZI	a. Sosialisasi ZI	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi ZI	Terselenggaraan sosialisasi ZI	0	0	0	38	38		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	38	38			
	b. Penetapan OPD pelaksana ZI				Jumlah OPD yang ditetapkan pelaksana ZI	Terbitnya SK PenetapanPelaksana ZI	0	0	0	10	10		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	10	10					

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran	
				(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)	
S.6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	a. Melakukan Review Penjabaran / Cascading kinerja atas ketidaksielarasan antar level perencanaan, antar indikator dan antar target kinerja pada perencanaan strategis pemerintah daerah	Dokumen Reviu Cascading kinerja	Terlaksananya reviu cascading kinerja	0	1	1	0	2		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	1	1	0	2		
					b. Melakukan sosialisasi tentang sistem manajemen informasi resiko	Jumlah peserta	Adanya pemahaman OPD/ASN tentang sistem manajemen resiko	0	0	60	0	60		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	60	0	60		
					c. Membuat Risk Register	Dokumen Risk Register	Adanya Risk Register per OPD/Unit Kerja	0	0	1	0	1		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	1	0	1		
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindaklanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100%	Sosialisasi aplikasi LAPOR-SP4N ke seluruh desa/kelurahan di Buton Utara	Jumlah Desa	Terlaksananya sosialisasi LAPOR-SP4N pada desa/kelurahan di Buton Utara	0	0	3	3	6		Kominfo/ Bagor	Seluruh Unit Kerja	0	0	3	3	6		
					a. Sosialisasi tentang pentingnya melakukan SPI dengan motto "berani mengisi habisi korupsi"	Jumlah peserta	Adanya Pemahaman ASN tentang survei penilaian integritas pada seluruh OPD	0	100	0	0	100		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	100	0	0	100		
					b. Melakukan penilaian terhadap transparansi integritas dalam pelaksanaan tugas pada OPD yang bersangkutan	Jumlah OPD yang dinilai	adanya transparansi integritas dalam pelaksanaan tugas pada seluruh OPD	0	10	10	18	38		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	10	10	18	38		

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran	
				(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)	
					c. Membuat banner yang menginformasi tentang link pengisian Survei penilaian integritas atau memindai barcode ditempat layanan publik	Jumlah bannerSPI yang disebarluaskan	banner informasi survei penilaian integritas	10	20	40	30	100		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	10	20	40	30	100		
		MCP KPK		60%	a. Melakukan rapat koordinasi dengan OPD dalam rangka pemenuhan dokumen MCP KPK	Jumlah OPD yang capaian pemenuhan dokumen MCP di atas 60%	OPD mampu menyiapkan kelengkapan dokumen sesuai permintaan MCP KPK	0	2	4	2	8		Inspektorat	Inspektorat /Bappeda/ BKAD/BK PSDM/DP MD/PTSP/ Bagor/UK PBJ	0	0	0	0	0		
					b. APIP melakukan audit kinerja pada pengadaan barang dan jasa	Dokumen	Audit Kinerja pada pengadaan Barang dan jasa	2	4	6	8	20		Inspektorat	Inspektorat /UKPBJ	2	4	0	6	12		
		Kepatuhan Penyampaian LHKPN		100%	Penekanan kepada pejabat Wajib LHKPN berupa sanksi pemotongan TPP yang dituangkan dalam Perbup TPP	Jumlah	Sosialisasi Penyampaian LHKPN	150	0	0	0	150		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	150	0	0	0	150		
11	Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP		Level 3	a. Mengimplementasikan Infrastruktur PK APIP	Jumlah Infrastruktur PK APIP	Infrastruktur PK APIP	0	0	1	0	1		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	1	0	1		
					b. Memutakhirkan peta auditn dan menggunakan risk register yang telah disusun OPD sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis resiko	Jumlah Dokumen	data peta auditn dan risk register di OPD	0	0	0	1	1		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	1	1		

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran		
				(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)		
					c. Melaksanakan audit kinerja secara berkelanjutan atas program strategis daerah yang memiliki <i>residual risk</i> tinggi	Jumlah Dokumen Audit kinerja	Dokumen Audit kinerja	0	0	0	1	1		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	1	1			
S.7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	40							0			Seluruh Unit Kerja						0		
		13	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60								0			Seluruh Unit Kerja						0	
S.8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	14	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	0	1. Sosialisasi Permendagri 83 tahun 2022.	Jumlah peserta	Terlaksananya sosialisasi Permendagri 83 Tahun 2022	0	0	0	60	60		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	60	60		
						2. Sosialisasi dan Bimtek aplikasi Srikandi	Jumlah peserta	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek aplikasi Srikandi	0	0	0	60	60		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	60	60		
		15	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0								0			Seluruh Unit Kerja						0	
		16	Penguatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70	Bimtek pengelolaan E-purchasing	Jumlah Peserta	terlaksananya pengelolaan e-purchasing sesuai standar	0	0	0	60	60	442.188.000,00	UKPBJ	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	0	0	286.761.260,00	
						Peningkatan kompetensi pejabat pengelola Pengadaan barang dan jasa	Jumlah JF PBJ	Terpenuhinya kebutuhan JF PBJ	6	2	3	3	14		UKPBJ	Seluruh Unit Kerja	4	0	0	0	4		
						Peningkatan Kematangan UKPBJ	jumlah indikator yang terpenuhi	terpenuhinya data dukung kematangan UKPBJ	13	13	13	13	52		UKPBJ	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	0	0		

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran	
					(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)	
S.9.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	17	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK	WTP	menyusun LKPJ tepat waktu berbasis data kinerja sehingga validasi data LKPJ dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik	Jumlah peserta	Rapat penyusunan dan pembahasan materi LKPJ yang disusun oleh semua OPD	0	60	0	60	120		BKAD/Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	60	0	60	120		
						menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPJ secara berkala dan memonitor tingkat penyelesaian rekomendasi yang diberikan melalui rapat-rapat koordinasi dengan seluruh OPD	Jumlah peserta	Rapat tindaklanjut rekomendasi BPK atas LKPJ tahun sebelumnya dengan semua OPD	0	60	0	60	120		BKAD/Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	60	0	60	120		
				Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	87,00%	Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD terkait yang menjadi rekomendasi BPK atas pelaporan tahun-tahun sebelumnya	Jumlah peserta	Rapat tindaklanjut rekomendasi BPK atas LKPJ tahun sebelumnya dengan semua OPD	0	60	0	60	120		Inspektorat	Seluruh Unit Kerja	0	60	0	60	120		
				Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	0								0			Seluruh Unit Kerja						0	
SS.2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional																						
S.1.	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	18	Penataan Jabatan Fungsional;	Indeks Sistem Merit		Melaksanakan Pengangkatan PNS dalam JF Ahli Muda Melalui Jalur Penyetaraan Jabatan	Jumlah JF yang disetarakan	Terlaksananya pengusulan Jabatan Fungsional melalui penyetaraan jabatan								Seluruh Unit Kerja							
S.2.	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	19	Penguatan Manajemen Talenta ASN			Memetakan ASN Butir yang potensial untuk mengikuti Talent Pool	Jumlah ASN yang akan ikut talent pool	terlaksananya Talent Pool di Lingkungan Pemerintah Kab. Buton Utara	0	0	0	150	150	149.808.000	BKPSDM/Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	80	0		

No.	Sasaran Strategis	Kegiatan Utama		Indikator Kegiatan Utama	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi				Capaian	Realisasi Anggaran	
					(2023)	(2023)	Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total	(Rp.)	Koordinator	Pelaksana	TW1	TW2	TW3	TW4	(%)	(Rp)	
S.6.	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	20	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;			Sosialisasi dan bimtek penggunaan Aplikasi E-Kinerja	Jumlah peserta	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi E-Kinerja															
		21	Penguatan Sistem Merit			Melaksanakan Penilaian mandiri Sistem Merit	Nilai Sistem Merit	Terlaksananya Penilaian mandiri Sistem Merit															
S.7.	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	22	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	75% (Sehat)	Melaksanakan kegiatan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Bangsa Melayani Bangsa serta Penguatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Buton Utara	Jumlah peserta	Terselenggaranya kegiatan internalisasi core values ASN BerAKHLAK dan EB ASN	0	0	0	100	100	0	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	0	0		

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 TAHUN 2020-2024

Format Matriks Roadmap RB Tematik

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target		Koordinator	Pelaksana
				2022	2023	2024		
1	KEMISKINAN	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan, indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2)	14.26% (9450 jiwa)	13,00%	12,50%	Bappeda/Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja
2	INVESTASI	Meningkatnya nilai investasi daerah	Realisasi Investasi (Jumlah PMDN dan PMA)	24.12 M	Rp. 15.6 M	Rp. 15.8 M	Dinas PM-PTSP	Seluruh Unit Kerja
3	INFLASI	Menurunnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi (YoY)				Dinas Perindag	Seluruh Unit Kerja
4	DIGITALISASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik				Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja
5	STUNTING	Menurunnya angka stunting	Persentase penurunan angka stunting	20,70%	20%		Dinas P2KB	Seluruh Unit Kerja
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi PDN	89%	90%	95%	Dinas Koperasi	Seluruh Unit Kerja

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 TAHUN 2020-2024

FORM RENCANA AKSI RB TEMATIK KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Meningkatnya kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan, indeks kedelaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2)	Angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,12%.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga TKSK	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0	0	5	0	5	Terkait	36.748.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Penyediaan Permakanan	Orang	Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabu/kota	0	0	100	0	100	Terkait	25.000.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	100	100	100%	25.000.000
						Penyediaan Sandang	Orang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kab/kota	0	100	0	0	100	Terkait	36.040.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	100	100	100%	25.000.000

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Penyediaan Alat Bantu	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	0	20 Orang	0	0	20 Orang	Terkait	53.190.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	20 Orang	-	20 Orang	100%	39.950.000
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0 Orang	Terkait	10.050.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah orang yang mendapatkan Layanan data dan Pengaduan kewenangan kab/kota	0	0	0	0	0	Terkait	17.013.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Penyediaan Permakanan	Jiwa	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan makanan	0	0	0	0	0 Orang	Terkait	9.600.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan data dan Pengaduan kewenangan kab/kota	0	10	30	35	75 Orang	Terkait	28.545.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah DTKS yang di verifikasi dan validasi (Rutin)	0	4500	0	0	4500 Orang	Terkait	150.000.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	4500 Orang	-	-	4500 Orang	100%	75.685.000
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Pendamping PKH	0	21 Orang	0	0	21 orang	Terkait	50.280.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Unit dan Set	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kab/kota	0	0	20 Unit	4 Set	20 Unit dan 4 Set	Terkait	281.650.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Penyediaan Makanan	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota	0	100	100	0	200 Orang	Terkait	140.052.500	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	100	-	-	100	50%	22.600.000
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kab/Kota	0	3	0	0	3 Unit	Terkait	18.600.000	Dinas Sosial	Seluruh Unit Kerja	-	-	-	-	-	0%	-
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	1.398.868.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persen	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	230.370.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persen	Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	240.144.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persen	Persentase Pelayanan Balita sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	524.555.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	202.375.600	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi ¹⁾	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persen	Persentase pelayanan kesehatan bagi usia produktif sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	169.138.500	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai standar	25	25	25	25	100	Terkait	122.308.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0%	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	25	25	25	25	100	Terkait	99.028.600	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	25	25	25	25	100	Terkait	22.622.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat Sesuai Standar	25	25	25	25	100	Terkait	115.470.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis Paru Sesuai Standar	25	25	25	25	100	Terkait	101.491.500	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	8%	12%	13%	0	33%	33%	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang beresiko terinfeksi HIV	persen	Persentase Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	25	25	25	25	100	Terkait	62.184.500	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%	

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persen	Persentase Desa STBM				50	50	Terkait	438.729.700	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	0	0	50	0	50%	100%		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah	Jumlah Kegiatan Gerakan Anti Narkoba				1	1	Terkait	31.000.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	0	1	0	0	1	100%		
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	15	30	35	20	100	Terkait	2.091.416.092	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	15	30	35	20	100	100%		
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persen	Persentase penerima Jaminan Kesehatan	25	25	25	25	100	Terkait	19.759.983.201	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	25%	25%	25%	0	75%	75%		
						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang jaringan irigasi	0	0	0	1	1	Terkait	995.447.635	Dinas PUPR	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	1	1	100%	543.142.635	
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	Panjang jaringan perpipaan	0	0	300	328	628	Terkait	758.781.725	Dinas PUPR	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	300	300	48%	48.681.725	
						Perluasan SPAM Jaringan Perdesaan	SR	Jumlah sambungan rumah	0	0	1401	0	1401	Terkait	9.901.559.000	Dinas PUPR	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	400	400	29%	#####	
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	SR	Jumlah sambungan rumah	0	0	467	0	467	Terkait	6.270.516.000	Dinas PUPR	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	200	200	43%	#####	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	jumlah dokumen database	1	1			2	Terkait	60.000.000	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja				2		2	100%	50.000.000
						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	lokasi	jumlah lokasi pembangunan perumahan	1	1	1		3	Terkait	9.600.000	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja			1	1	2		67%	3.600.000

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi ^(*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	unit	jumlah unit terbangun		5			5	Terkait	250.000.000	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja				5	5	100%	-	
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	jumlah dokumen database	2				2	Terkait	15.000.000	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja				1		1	50%	5.000.000
						Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen	jumlah dokumen Lingkungan		2			2	Terkait	140.000.000	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja				1		1	50%	70.000.000
						Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	unit	jumlah unit rumah terbangun		101			101	Terkait	2.104.195.000	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja				101			100%	5.000.000
						Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	unit	jumlah unit PSU terbangun	20	20	23		63	Terkait	8.932.074.594	Dinas Perumahan	Seluruh Unit Kerja		30	30			60	95%	#####
						Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Unit	Termonitoringnya Lumbung Pangan Masyarakat	2	2	2	2	8	Terkait	37.702.000	Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	0	2	4			6	75%	34.852.800
						Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	Termonitoringnya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	5	5	5	5	20	Terkait	27.780.000	Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	2	5	6			12	60%	25.266.900

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			
						Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	Tesunnya Dokumen Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1	1	Terkait	24.940.000	Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	0	0	0			0	15.991.800	
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Tesediannya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten				5	5	Terkait	113.520.000	Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	0	0	0			0	33.104.000	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok	Jumlah Kelompok Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan			2	2	4	Terkait	70.790.000	Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	0	2	2			4	100%	67.300.000
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Peta Kerawanan Dan Ketahanan Pangan				1	1	Terkait	37.284.000	Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Unit Kerja	0	0	0			0	0	36.729.000
						Pengadaan Bahan Bangunan dan Konstruksi berupa mesin pompa Alkon	4 Unit	Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang diberikan bantuan	2 Kelompok				2 Kelompok						2 Klpk				2 Klpk	100%	449.963.000
						Bantuan Bahan Baku (Kacang Kedelai) UMK Produksi Makanan Tahu dan Tempe	1670 Kg	Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang diberikan bantuan	1 Kelompok				1 Kelompok						2 Klpk				2 Klpk	100%	
						Pengadaan Pupuk An Organik NPK untuk diserahkan kepada masyarakat	9520 Kg	Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang diberikan bantuan	4 Kelompok				4 Kelompok			450.762.200	Dinas Transmigrasi			2 Klpk				2 Klpk	

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi ^(*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)				
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total						
						Bantuan kepada Masyarakat berupa Bahan Baku (Pengrajin Tas Jinjing) UMK Produksi Kerajinan Tas Jinjing dan Keranjang	1 Paket	Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang diberikan bantuan	1					1						2	Klpk				2	Klpk	100%	
						Bantuan Natura dan Pakan-Pakan Pakan Ternak Ayam	6071 Kg	Jumlah kelompok masyarakat transmigrasi yang diberikan bantuan	2					2						2	Klpk				2	Klpk	100%	
2	PENANGANAN INFLASI	Nilai inflasi yang cukup tinggi sehingga perlu diturunkan	Menurunnya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi (YoY)	Penurunan target pengendalian inflasi/ IPH.	1. Menyelenggarakan Operasi Pasar menjelang Bulan puasa, hari raya Idul Fitri, Natal, tahun baru dan liburan sekolah.	Jumlah Operasi Pasar	Terlaksananya Operasi Pasar	1 OP	1 OP	-	7 OP	9 OP	Terkait	Rp 275.360.000	Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Perindag dan Dinas Ketapang	Seluruh Unit Kerja	1	1	-				1	3 OP	33%	110.000.000	
						2. Pelaksanaan Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar	Jumlah Sidak Pasar	Terlaksananya Sidak Pasar	3 SP	3 SP	3 SP	3 SP	12 SP	Terkait	-	Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Perindag dan	Seluruh Unit Kerja	3	2	-				5	kali	42%	-	
						3. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Rapat	Terlaksananya Rapat-rapat penanganan inflasi	1 Rapat	1 Rapat	1 Rapat	1 Rapat	4	Terkait	Rp 8.000.000	Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas	Seluruh Unit Kerja	1	1	-				2	kali	50%	4.000.000	
3	DIGITALISASI PEMERINTAHAN	Rendahnya capaian keterbukaan informasi Badan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik	Peringkat 3 terbaik di level Provinsi	1. Kegiatan Pembuatan e - Buletin/Majalah/ Tabloid Pemerintah	Jumlah dan frekuensi terbit Buletin/Majalah/Tabloid Pemerintah	Publikasi elektronik Buletin/Majalah/ Tabloid Pemerintah	3 SKPD	3 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	16 SKPD	Terkait	-	Dinas Kominfo	Seluruh Unit Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4	PENANGANAN STUNTING	Tingginya angka stunting	Menurunnya angka stunting	Persentase penurunan angka stunting	20,09%	Pembagian BKB Stunting di Desa Lokus	Kegiatan	27 Desa/ Kel Lokus Stunting	0	0	100%	0	100%	Terkait	360.000.000	Dinas P2KB	Bidang KB/KS						100%	100%	88,04	316.926.000		
						Pendampingan Catin	Orang	487 Catin	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	303.600.000	Dinas P2KB	Bidang KB/KS	0%	30%	30%			60%	19,88	60.366.000			

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Pendampingan Bagi Balita, Baduta yang Stunting dan Ibu Hamil Yg Beresiko Stunting	Orang	276 Tim Pendamping Keluarga Melakukan Pendampingan	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	276.000.000	Dinas P2KB	Bidang KB/KS	0%	27%	30%		57%	20,69	57.100.000
						Pembuatan atau Peraktek DASYAT di Desa	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan di 19 Kampung KB	23%	25%	27%	25%	100%	Terkait	665.000.000	Dinas P2KB	Bidang Daiduk	0%	25%	30%		55%	39,71	264.100.000
						Rapat- Rapat TPPS	Kegiatan	1 Kali/Tahun			1		1	Terkait	120.000.000	Dinas P2KB	Seluruh Unit Kerja		1			100%	41,35	49.620.000
						Melakuka Audit dan Desiminasi Kasus Stuting di Desa Lokus	Kegiatan	2 Kali/Tahun		50%		50%	100%	Terkait	80.000.000	Dinas P2KB	Tim Audit Kasus Stunting		50%			50%	48,77	39.019.730
						Minlok di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	6 Kecamatan		50%		50%	100%	Terkait	78.000.000	Dinas P2KB	Seluruh Unit Kerja		50%			50%	44,93	35.045.000
						Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	Persentase ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi	20	25	25	15	85	Terkait	561.037.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	38	73,58	85,29		85,29	85%	52.964.624
						Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	%	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	20	20	25	20	85	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	29	40,66	51,69		51,69	51,69	-
						Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	%	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	15	20	20	20	75	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	5,04	6,7	0		6,7	6,7	-
						Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	%	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	15	20	25	15	75	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	58	48,74	45,78		45,78	45,78	-

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	%	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	15	20	20	15	70	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	54	86	81,66		81,66	81,66	-
						Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	20	27	25	15	87	Terkait	172.775.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	100	100	87,5		87,5	87,5	61.590.000
						Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	20	20	20	20	80	Terkait	305.151.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	72,09	72,46	76,18		76,18	76,18	131.710.000
						Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	Jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	20	20	25	20	85	Terkait	605.227.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	71	58,12	52,21		52,21	52,21	91.430.624
						Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	%	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	25	25	25	25	100	Terkait	441.700.200	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	19,8	41,7	65,5		65%	65%	170.110.000
						Pelaksanaan Gerakan Stunting dan Aksi Bergizi		Terlaksananya Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting dan Aksi Bergizi	0	1	1	0	2	Terkait	61.400.000	Dinas Kesehatan	Seluruh Unit Kerja	0	0	2	0	2	100%	58.730.000

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)				
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total						
						Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Perkawinan tingkat Kabupaten dengan salah satu Materi Penurunan serta Pencegahan Stunting	Kegiatan	Terlaksananya Bimbingan Perkawinan tingkat Kabupaten dengan salah satu Materi Penurunan serta Pencegahan Stunting				1			1	Terkait	Rp. 13.340.000	Kementerian Agama	Kantor Kabupaten/Kota			1				1	100%	13.340.000
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Damai Laborona Kec. Bonegunu	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				50%	50%	100%	Terkait	1.160.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. NUR JAYA MANDIRI				50%	50%	100%	62%	290.125.000		
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Waode Buri Kec. Kulisusu Utara	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				50%	50%	100%		811.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. VIOLA JAYA				50%	50%	100%	100%	202.825.000		
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Lauki Kec. Kulisusu Barat	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				50%	50%	100%		394.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. ZIADAH MEKAR				50%	50%	100%	100%	98.550.000		
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Langere Kec. Bonegunu	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				50%	50%	100%		573.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. ILHAM PRATAMA				50%	50%	100%	100%	143.475.000		
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Koboruno Kec. Bonegunu	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				50%	50%	100%		354.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. NADHIF AMANAH				50%	50%	100%	100%	88.650.000		
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Kelurahan Lakonea Kec. Kulisusu	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				50%	50%	100%		1.360.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. LIPU INDO				50%	50%	100%	100%	340.000.000		

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Banubanua Jaya Kec. Kulisusu	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak			50%	50%	100%		889.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. AYUF ELEKTRIKA L			50%	50%	100%	100%	222.375.000
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Linsowu Kec. Kulisusu	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak			50%	50%	100%		1.010.867.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. BANGUN SARANA PERKASA			50%	50%	100%	100%	252.716.750
						Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Desa Pongkowulu Kec. Kambowa	SR	persentase rumah tangga dengan akses air minum layak			50%	50%	100%		1.653.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV. AISH ARSHIYA			50%	50%	100%	100%	413.300.000
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Buranga Kec. Bonegunu	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM BURANGA			50%	50%	100%	100%	150.000.000
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Damai Laborona Kec. Bonegunu	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		1.044.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM PASIR PUTIH			50%	50%	100%	100%	261.000.000
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lamoahi Kec. Kulisusu Utara	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		660.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM PESISIR INDAH			50%	50%	100%	100%	165.000.000

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Linsowu Kec. Kulisusu	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		756.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM LINSOWU			50%	50%	100%	100%	189.000.000
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pongkowulu Kec. Kambowa	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		1.164.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM PONGKOWULU			50%	50%	100%	100%	291.000.000
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Ronta Kec. Bonegunu	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		624.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM RONTA			50%	50%	100%	100%	156.000.000
						Pembangunan Tangki Septik Sakala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Waculaa Kec. Kulisusu	SR	persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak			50%	50%	100%		756.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KSM LOWI MALIMBU			50%	50%	100%	100%	189.000.000
5	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) perlu ditingkatkan	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi PDN	Realisasi PDN sebesar 45%.	1. Program Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri	Jumlah persentase PDN dalam belanja barang dan jasa di SKPD	Meningkatnya penggunaan PDN dalam Belanja Pemda	10%	10%	10%	15%	45%	Terkait	RP 305.812.000	Dinas Koperasi	Seluruh unit kerja	15%	25%	34%			74%	RP. 224.955.500

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
						2. Pembinaan (coaching clinic) kepada penyedia barang/jasa untuk peningkatan mutu/kualitas produk dalam negeri	Jumlah pembinaan yang terlaksana	Terselenggaranya Pembinaan (coaching clinic) kepada penyedia barang/jasa untuk peningkatan mutu/kualitas produk dalam negeri	2	2	2	4	10	Terkait	RP 0	Dinas Koperasi	Seluruh unit kerja	0	0	0		0	0	-
						3. Fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produsen /pelaku usaha/UMKM di daerah	Jumlah sertifikasi pelaku usaha	Terselenggaranya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produsen/pelaku usaha/UMKM di daerah	50	100	150	200	500	Terkait	P XXX.XXX.XXX	Dinas Perindag	Seluruh unit kerja							
6	PENINGKATAN INVESTASI	Nilai Investasi di sektor pariwisata perlu ditingkatkan	Meningkatnya nilai investasi sektor pariwisata daerah	Realisasi Investasi (Jumlah PMDN dan PMA)	Rp xxx.xxx.xxx (Naik sebesar 30%)	1. Menyelenggarakan Pekan Investasi Pariwisata Nasional 2.Peningkatan Kolaborasi BUMD, Perusahaan Swasta Asosiasi Pariwisata Daerah dan Pemerintah (PIPn)	1. Hasil realisasi investasi PMDN 2. Jumlah Kerjasama Investasi Nasional	Penandatanganan Kerjasama Investasi PMDN		PIPn I Terlaksana	3 MoU	PIPn II Terlaksana	3 MoU	Terkait	P XXX.XXX.XXX	Dinas Pariwisata	Seluruh Unit Kerja							
						3. Menyelenggarakan Pekan Investasi Pariwisata Internasional (PIPI) 4.Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Nasional, Internasional, Asosiasi Pariwisata Daerah	1.Hasil realisasi investasi PMA 2.Jumlah Kerjasama Investasi Asing	Penandatanganan Kerjasama Investasi PMA						Terkait	P XXX.XXX.XXX	DPM.PTSP	Seluruh Unit Kerja							

No.	Tema	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran (Rp.)	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			
		Lamanya Proses izin berusaha	Meningkatnya proses izin berusaha	rata-rata lama waktu perizinan	30 menit	Menyederhanakan SOP	Jumlah SOP yang disederhanakan	SOP yang disederhanakan	1	1	1	1	4	Terkait	P XXX.XXX.XXX	DPM.PTSP	Seluruh Unit Kerja								
						Melakukan penilaian kinerja pegawai	%	Pegawai yang dinilai kinerjanya						Tidak terkait	P XXX.XXX.XXX	DPM.PTSP	Seluruh Unit Kerja								
						Melaksanakan monev capaian kinerja pegawai	%	Capaian kinerja pegawai						Tidak terkait	P XXX.XXX.XXX	DPM.PTSP	Seluruh Unit Kerja								

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH